



Jateng
gayeng

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018

**DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Rasa syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas ridho-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.

LkjIP ini merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) yang baik sebagai mana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan merupakan tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP juga merupakan wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran.

Tujuan penyusunan LkjIP yaitu untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, keberhasilan capaian sasaran saat ini, dan untuk percepatan peningkatan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun mendatang. LkjIP ini juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami susun, semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. SURYO BANENDRO, MP.
NIP. 19610408 198903 1 006

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
Daftar Isi	ii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
C. Aspek Strategis/Isu Strategis	3
D. Sistematika Penulisan	5
II. PERENCANAAN KINERJA	7
A. Perjanjian Kinerja	7
III. AKUNTABILITAS KINERJA	9
A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2017.....	9
B. Realisasi Anggaran	14
IV. PENUTUP.....	22
A. Kesimpulan	22
B. Saran... ..	23

I. PENDAHULUAN

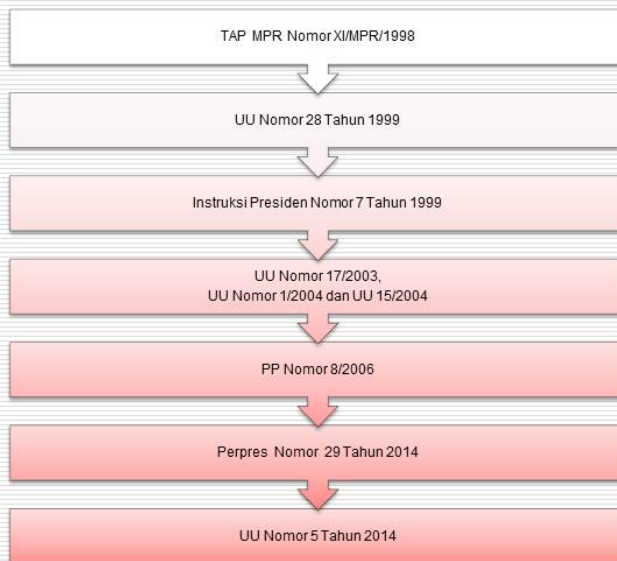
A. Latar Belakang

Misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu “Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran dan meningkatkan penanganan infrastruktur pertanian.” Misi ini bertujuan mewujudkan desa mandiri/berdikari melalui kedaulatan pangan dan energi. Hal ini sejalan dengan salah satu Nawa Cita adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Terkait dengan hal tersebut, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah menggerakkan sektor sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan secara akuntabel, dengan mengukur hasil-hasilnya baik secara fisik maupun finansial. Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan target kinerja yang ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik.

Sistem AKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah (Perpres 29 Tahun 2015). Berdasarkan Inpres No: 7/1999, instansi pemerintah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas perencanaan yang telah ditetapkan. Inpres ini mewajibkan seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Tujuan dan Sasaran Strategis organisasi, Kebijakan/Program dan indikator kinerja), mengukur keberhasilan organisasinya melalui seperangkat indikator kinerja yang ditetapkannya sendiri, dan melaporkan akuntabilitas kinerjanya. Dasar hukum tertera pada gambar 1.

Mandat Berakuntabilitas Kinerja



- Akuntabilitas adalah salah satu tonggak penting era reformasi. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menyatakan Akuntabilitas sebagai salah satu **asas umum dalam penyelenggaraan negara**.
- UU Nomor 17/2003 menegaskan bahwa salah satu asas **best practices** dalam pengelolaan keuangan negara adalah **akuntabilitas berorientasi pada hasil** atau dengan kata lain manajemen pemerintahan kita telah memasuki era **performance-based management**.
- UU Nomor 1/2004 dan UU Nomor 15/2014 menyatakan bahwa salah satu asas pengelolaan keuangan negara adalah akuntabilitas berorientasi pada hasil. Laporan pertanggungjawaban meliputi laporan keuangan dan laporan kinerja. Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah diatur dengan peraturan pemerintah.
- **PP 8 /2006**. Laporan Kinerja dihasilkan dari suatu **sistem akuntabilitas kinerja** instansi pemerintah yang diselenggarakan oleh masing-masing Entitas Pelaporan dan/atau Entitas Akuntansi. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ditetapkan dalam **Peraturan Presiden**.
- **Perpres Nomor 29/2014** penyelenggaraan SAKIP untuk penyusunan laporan kinerja dan dilaksanakan selaras dengan sistem akuntansi, tatacara pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan
- UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan bahwa **kinerja instansi pemerintah** menjadi dasar dari pengukuran **kinerja individu**. (pengukuran kinerja pegawai mengacu pada pengukuran kinerja instansi

Gambar 1. Dasar Hukum Sistem AKIP

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

b.1 Kedudukan

Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah merupakan dinas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2018 yaitu tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.

b.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, antara lain: Melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang pertanian sub urusan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2018 antara lain meliputi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha;
- d. Pelaksanaan administrasi bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya;

C. Aspek Strategis/Isu Strategis

Pada Tahun 2018 Dinas Pertanian dan Perkebunan fokus pada pencapaian sasaran utama, "Memantapkan Produksi Komoditas Tanaman Pangan, hortikultura dan perkebunan sebagai Wujud Kontribusi Kedaulatan Pangan di Jawa Tengah," yaitu:

- a. Terwujudnya peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- b. Terwujudnya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Perkebunan

Strategi untuk mencapai sasaran tersebut, meliputi:

1. Meningkatkan produksi melalui intensifikasi usahatani tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
2. Melaksanakan penambahan/rehabilitasi infrastruktur pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan

3. Pencegahan, pengendalian dan pemantauan organisme pengganggu tanaman (OPT) serta melakukan mitigasi akibat bencana alam, banjir dan kekeringan;
 4. Optimalisasi kebun benih dan sertifikasi benih sebagai penjamin penggunaan benih bermutu di masyarakat;
 5. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan melalui modernisasi pertanian;
 6. Meningkatkan pengamanan produksi melalui perbaikan panen dan pasca panen serta pembukaan pasar melalui berbagai promosi pemasaran; ;
 7. Melaksanakan peningkatan kemampuan dan ketrampilan sumberdaya manusia pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 8. Penguatan kelembagaan dan dukungan jaminan usaha/asuransi petani
- Sedangkan kebijakan yang terkait dengan pencapaian sasaran adalah:

1. Penerapan Permentan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kawasan Pertanian berbasis Korporasi
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani mendukung kegiatan asuransi bagi petani
3. Peningkatan produksi melalui intensifikasi pertanian dan perkebunan.
4. Penerapan Good Agriculture Practises)GAP) dalam rangka mendukung pengembangan pertanian organik.
5. Penyebaran benih bermutu bersertifikat melalui Balai Benih dan Optimalisasi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB)
6. Pengamanan pertanaman dan produksi dari gangguan OPT serta bencana alam, banjir dan kekeringan.
7. Pengamanan produksi melalui perbaikan panen dan pasca panen serta pembukaan pasar melalui berbagai promosi pemasaran.
8. Menyiapkan dukungan infrastruktur, prasarana dan sarana untuk meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan.
9. Menyiapkan SDM berkualitas untuk mendukung pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Tabel 1. Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan Target Kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan, Tahun 2018

Tujuan 1	Sasaran 2	Indikator Sasaran 3	Tahun 2018 4
1. Memantapkan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebagai wujud kontribusi kedaulatan pangan di Jawa Tengah	1. Terwujudnya peningkatan produksi tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (%): <ul style="list-style-type: none"> • Padi 0,40% • Jagung 0,40% • Kedelai 2,58% • Kacang Tanah 0,30% • Kacang hijau 0,30% • Ubi Kayu 0,30% • Ubi Jalar 0,30% 	
		Peningkatan Produksi Hortikultura (%): <ul style="list-style-type: none"> • Bawang merah 0,25% • Kentang 0,25% • Cabe besar 1,00% • Durian 0,30% • Mangga 0,75% • Salak 0,90% 	
		Peningkatan Produksi Perkebunan (%) <ul style="list-style-type: none"> Tebu 0,22% Kelapa 1,00% Kopi 2,00% Kakao (10,93)% 1,99% Karet (0,78)% Teh 1,99% Cengkeh 	
	Terwujudnya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Perkebunan	Peningkatan kualitas Balai Penyuluhan dan Penumbuhan posluhdes (%) <ul style="list-style-type: none"> 4,78% 1,46% 	
		Penyuluh yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keahlian (%) <ul style="list-style-type: none"> 10% 	

Sumber: Renstra Distanbun Prov Jateng 2013-2018

D. Sistematika Penulisan

Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pemerintah LKJIPTh 2018 terdiri 5 Bab dan masing-masing bab terdiri dari sub bab, yaitu:

Bab I. PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

B.Tugas Pokok dan Fungsi

Bab II. PERENCANAAN KINERJA

A. Perjanjian Kinerja Th 2018

Bab III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2018

B. Realisasi Anggaran

Bab IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

II. PERENCANAAN KINERJA

A. Perjanjian Kinerja Th 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah telah melakukan perjanjian kinerja Tahun 2018 dengan Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Perjanjian berisikan tentang tanggung jawab Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan Gubernur melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lampiran perjanjian kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan ProvinsiJateng tersaji pada tabel 2.

Tabel2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Dinas Pertanian dan Perkebunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura yang berkelanjutan	Angka produksi TPH	
		Tanaman Pangan (Ton):	
		Padi	10.351.427
		Jagung	3.053.181
		Kedelai	154.795
		Kacang tanah	143.657
		Kacang hijau	99.061
		Ubi kayu	3.397.000
		Ubi jalar	173.221
		Hortikultura (Ton)	
		Bawang merah	432.338
		Kentang	291.725
		Cabe besar	127.462
		Durian	80.916
Mangga	439.532		
Salak	466.033		
5	Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas unggulan perkebunan Jawa Tengah	Angka Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan (Ton)	
		- Tebu	4.460.000
		- Kopi	18.273

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
		- Kakao	1.890
		- Kelapa	191.840
		- Karet	2.650
		- Cengkeh	7.066
		- Teh	6.350

No	Program	Anggaran	Ket.
1	2	3	4
1	Program Pengembangan Agribisnis	144.517.893.000	APBD
2	Program Peningkatan SDM dan Penyuluhan Pertanian Dinas Pertanian dan Perkebunan	15.821.150.000	APBD
3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pertanian dan Perkebunan	11.611.000.000	APBD
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Pertanian dan Perkebunan	15.401.686.000	APBD
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Dinas Pertanian dan Perkebunan	190.000000	APBD
6	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	1.401.940.000	Dekon - APBN
7	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	157.352.390.000	TP Prov - APBN
8	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	17.280.079.000	Dekon - APBN
9	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	290.782.869.000	TP Prov - APBN
10	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	9.758.225.000	Dekon - APBN
11	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	82.769.840.000	TP Prov - APBN
12	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	2.109.500.000	Dekon - APBN
13	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	41.607.460.000	TP Prov - APBN
14	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian	57.596.060.000	Dekon - APBN
	Jumlah APBD	187.541.729.000	
	Jumlah APBN	660.658.363.000	

Sumber: Perjanjian Kinerja Distanbun Th 2018

III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2018

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Proses pengukuran akuntabilitas kinerja didasarkan pada capaian pengukuran hasil rencana kerja tahunan dan perjanjian kinerja yang telah disepakati bersama. Pengukuran ini merupakan suatu hasil penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja utama (tabel 6) dan kegiatan berupa masukan, keluaran, dan hasil. Pengukuran keberhasilan capaian sasaran strategis dan target organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan strategis, menggunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan capaian sasaran RPJMD Tahun 2018, dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realiasi pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Indikator sasaran kinerja utama Dinas Pertanian dan Perkebunan tertera pada tabel 3.

Tabel 3. Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian dan Perkebunan, Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura yang berkelanjutan	- Angka produksi TPH	
	Tanaman Pangan (Ton):	
	1 Padi	10.351.427 ton
	Jagung	3.053.181 ton

		Kedelai	154.795	ton
		Kacang tanah	143.657	ton
		Kacang hijau	99.061	ton
		Ubi kayu	3.397.000	ton
		Ubi jalar	173.221	ton
	2	Hortikultura (Ton):		
		Bawang merah	432.338	ton
		Kentang	291.725	ton
		Cabe besar	127.462	ton
		Durian	80.916	ton
		Mangga	439.532	ton
	Salak	466.033	ton	
Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas unggulan perkebunan Jawa Tengah		Angka produksi komoditas unggulan perkebunan		
		Tebu	4.460.000	ton
		Kopi	18.273	ton
		Kakao	1.890	ton
		Kelapa	191.840	ton
		Karet	2.650	ton
		Cengkeh	7.066	ton
	Teh	6.350	ton	
Terwujudnya Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Perkebunan		Peningkatan Kualitas Balai Penyuluhan dan Penumbuhan Posluhdes	438 dan 3.483	Unit
		Penyuluh yang Memiliki Kopentensi sesuai Bidang Keahlian (%)	80	%

Capaian kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran dapat digambarkan sebagai berikut:

Capaian kinerja produksi tanaman pangan secara umum tersaji pada tabel 4. Komoditas strategis tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan meliputi padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, bawang merah, kentang, cabai besar, durian, manga, salak, tebu, kopi, kakao, kelapa, karet, cengkeh dan teh.

Tabel 4. Capaian Kinerja Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2018

Indikator Kinerja	Capaian (Th 2017)	Tahun 2018				Target Tahun 2018
		Target	Realisasi)*	% Capaian	% Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD (Th 2018)	
Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura						
Tanaman Pangan (Ton)						
Padi	11.396.629	10.351.427	11.167.933	107,89	107,89	10.351.427
Jagung	3.577.507	3.053.181	3.414.906	111,85	111,85	3.053.181
Kedelai	105.553	154.795	166.195	107,36	107,36	154.795
Kacang tanah	91.234	143.657	86.603	60,28	60,28	143.657
Kacang hijau	123.228	99.061	125.060	126,25	126,25	99.061
Ubi kayu	3.138.864	3.397.000	2.556.459	75,26	75,26	3.397.000
Ubi jalar	145.068	173.221	152.056	87,78	87,78	173.221
Hortikultura (Ton)						
Bawang merah	474.514	432.338	443.163	102,50	102,50	432.338
Kentang	266.915	291.725	290.936	99,73	99,73	291.725
Cabe besar	195.522	127.462	169.145	132,70	132,70	127.462
Durian	91.385	80.916	143.028	112,94	112,94	80.916
Mangga	389.019	439.532	389.091	88,52	88,52	439.532
Salak	576.361	466.033	576.361	123,67	123,67	466.033
Perkebunan (Ton)						
Tebu	2.904.903	4.460.000	2.933.316	61,83	61,83	4.460.000
Kopi	15.097	18.273	22.375	122,45	122,45	18.273
Kakao	2.140	1.890	1.801	95,29	95,29	1.890
Kelapa	158.302	191.840	170.085	85,62	85,62	191.840
Karet	2.898	2.650	7.441	105,31	84,33	2.650
Cengkeh	5.064	7.066	5.395	65,67	91,58	7.066
Teh	5.983	6.350	5.820	91,65	91,65	6.350

Keterangan: Realisasi 2018 merupakan angka sementara (asem)

Merujuk pada skala pengukuran kinerja, pada Tahun 2018 pencapaian produksi tanaman pangan pada komoditas padi (107,89%) melebihi target walaupun dibanding tahun 2016 dan tahun 2017 mengalami penurunan, produksi jagung (111,85%) tahun 2018 melebihi target dibanding tahun 2016 dan tahun 2017 mengalami penurunan, produksi kacang hijau (126,25%) tahun 2018 melebihi target dan meningkat dibanding tahun 2016 dan 2017, produksi kedelai (107,36%) tahun 2018 melebihi target dan meningkat dibanding tahun 2016 dan 2017.

Produksi komoditas tanaman pangan Jawa Tengah Th 2018 telah berkontribusi di tingkat nasional. Beras berkontribusi sebanyak 13,44 % (3.527.015 ton), dan jagung berkontribusi 12,37% (2.998.157 ton). Sedangkan kedelai Jawa Tengah masih kekurangan 164.703 ton. Perhitungan ini tertera pada tabel 5.



Gambar 1. Lay out Upsus Pajale

Tabel 5. Kontribusi Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai Jawa Tengah di Tingkat Nasional Th 2018, berdasarkan Angka Sementara

Komoditi	Produksi (ton)	Penyediaan (ton)	Kebutuhan (ton)	Plus/Minus	% Kontribusi Nasional
Padi	11.167.933	6.741.561	3.214.546	3.527.015	13,44
Jagung	3.414.906	3.039.267	41.109	2.998.157	11,36
Kedelai	166.195	157.321	322.024	(164.703)	16,91

Catatan Produksi merupakan angka sementara

Capaian produksi komoditas hortikultura pada tahun 2018 menurun dibanding tahun 2017 tetapi masih diatas target kecuali pada komoditas kentang (99,73%). Presentase pencapaian target produksi bawang merah 102,50%, cabai besar 132,70%. (tabel 6).

Tabel 6. Kebutuhan dan pemenuhan bawang merah, cabai besar, dan kentang di Jawa Tengah, TH 2018

No	Komoditas	Penyediaan (ton)	Kebutuhan	(+/-) ton
1	Bawang Merah	443.163	96.07	31.923
2	Cabai Besar	169.145	70.332	98.813

3	Kentang	290.936	55.905	235.031
---	---------	---------	--------	---------

Tabel 7. Produksi komoditas perkebunan di Jawa Tengah Tahun 2018

No	Komoditas	Target	Produksi	(+/-) Ton
1	Tebu	4.460.000	2.933.316	-1.526.684
2	Kopi	18.273	22.375	4.102
3	Kakao	1.890	1.801	-89
4	Kelapa	191.840	170.085	-21.755
5	Karet	4.010	3.539	-471
6	Cengkeh	7.066	7.441	375
7	Teh	6.350	5.820	-530

Pencapaian produksi padi dan jagung ini didukung melalui “Upaya Khusus Pajale” meliputi rehab jaringan irigasi, percepatan optimasi lahan, bantuan benih padi, jagung, kedelai, bantuan pupuk, dan bantuan alsintan berupa traktor roda dua, pompa air, combine harvester mini, corn sheller, vertical drying, dan RMU, serta kegiatan pengembangan kawasan padi- jagung- kedelai, dan perluasan areal tanam jagung dan kedelai. Sedangkan untuk kedelai pada tahun 2017 belum mencapai target karena adanya iklim yang tidak sesuai sehingga menyebabkan penurunan produksi kedelai yang cukup signifikan dan petani lebih memilih menanam kacang hijau yang harganya relatif lebih tinggi.

Untuk komoditas bawang merah dan cabe produksi tahun 2017 dan 2018 melebihi target didukung dengan adanya program “UPSUS BABE (Upaya Khusus Bawang Merah dan Cabe)” meliputi bantuan benih bawang merah dan cabe, bantuan pupuk, dan bantuan alsintan disamping itu banyaknya program-program pemerintah baik dari APBD maupun APBN menyumbang peningkatan luas tanam cabe dan terjaganya kestabilan harga dan pasokan cabe. Sedangkan untuk komoditas kentang belum mencapai target karena pengaruh curah hujan yang tinggi dari tahun 2015-2017 yang mengganggu (tidak menguntungkan) dalam budidaya kentang. Banyak petani beralih dari budidaya kentang ke komoditas sayuran lain yang lebih tahan terhadap curah hujan tinggi, juga adanya penurunan harga kentang pada tahun

2016 dan awal 2017 mengakibatkan berkurangnya minat petani untuk menanam kentang.

Untuk komoditas perkebunan pada Tahun 2017 tebu tidak mencapai target dikarenakan adanya penurunan areal tebu, alih komoditas, alih fungsi lahan dan beberapa daerah saat panen kurang optimal karena batang tebu kering, pada tahun 2018 juga tidak mencapai target karena petani tebu beralih menanam komoditas ubi kayu dimana tahun 2018 harganya meningkat sehingga lahan yang biasa ditanami tebu diganti ubi kayu, kakao tidak mencapai target karena curah hujan pada tahun 2017 lebih rendah yang berpengaruh pada turunnya produktivitas dan produksi kakao, kelapa belum mencapai target karena beberapa tanaman pada masa produktif mulai terserang OPT jenis wang wung yang mengakibatkan tanaman rusak dan tidak dapat berproduksi secara optimal dan adanya alih fungsi lahan, karet tidak mencapai target karena adanya penurunan areal tanaman karet sedangkan produktivitas relatif tetap, untuk teh akibat musim kemarau basah sehingga kesulitan dalam pengeringan daun teh. Kinerja untuk tahun 2018 tebu tidak mencapai target karena luasan yang berkurang minat petani beralih ke komoditas hortikultura dan tanaman pangan karena tidak menjanjikan (biaya produksi tinggi), pada tanaman kakao terjadi serangan OPT (pengangrek) dan iklim yang kurang mendukung, untuk tanaman kelapa karena adanya serangan OPT wangwung, untuk tanaman karet sudah mengalami peningkatan dibanding tahun 2017 namun target belum terpenuhi dikarenakan terdapat penanaman ulang sehingga belum masuk dalam tanaman yang menghasilkan, untuk tanaman teh luasannya berkurang dikarenakan beralih ke tanaman kopi.

Capaian kinerja pada tahun 2019 sampai dengan Triwulan II sebagai berikut Padi 5.655.867 ton dari target 11.543.015 ton jagung 1.718.583 ton dari target 3.660.360 ton, kedelai 43.375 ton dari target 102.726 ton bawang merah 360.373 ton dari target 528.537 ton, cabe 103.514 ton dari target 200.836 ton, tebu target 2.934.025 ton, kopi target 20.482 ton, kelapa target 164.248 ton.

B. Realisasi Anggaran

1. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan, pada Tahun Anggaran 2018, di dukung oleh Anggaran APBD : Belanja Langsung sebesar Rp 187.541.729.000 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 128.781.582.000 jadi total anggaran secara keseluruhan Rp. 316.323.311.000.

Anggaran APBD terserap 92,26 % atau senilai Rp291.832.993.536. Tidak terserap 7,74 % atau senilai 24.490.317.464.Sedangkan fisik kegiatan terserap 99,14%.

Tabel 8. Penggunaan anggaran APBD Tahun 2018

Program	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
Belanja Tidak Langsung	128.781.582.000	125.750.318.107	97,64
Belanja Langsung	187.541.729.000	166.081.679.800	88,56
Jumlah	316.323.311.000	291.832.993.536	92,26

Tabel 9. Penggunaan Anggaran APBN Tahun 2018

Program	Dekonsentrasi		
	Anggaran (Rp)	Serapan	% Serapan
Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Melalui Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	17.280.079.000	16.631.323.000	96,25
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Hortikultura Berkelanjutan	9.758.225.000	8.788.465.000	90,06
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Sarana Pertanian	1.401.940.000	1.337.710.750	95,42
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan	2.109.500.000	1.795.299.470	85,11
Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian	57.596.060.000	55.943.647.400	97,13
Jumlah	88.145.804.000	84.496.445.620	95,86

Program	Tugas Pembantuan		
Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Melalui Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	290.782.869.000	283.267.378.000	97,42
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Hortikultura Berkelanjutan	82.769.840.000	61.816.071.000	74,68
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan	41.607.460.000	29.986.392.260	72,07
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Sarana Pertanian	157.352.390.000	154.387.220.000	98,12
Jumlah	572.512.559.000	529.457.061.260	92,48
Total Anggaran (DK+TP)			660.658.363.000
Total Serapan (DK+TP)			613.953.506.880
% Serapan APBN			92,93

Anggaran APBN sebesar Rp **660.658.363.000** (Dekonsentrasi sebesar Rp **88.145.804.000** dan Tugas Pembantuan sebesar Rp **572.512.559.000**). Serapan anggaran APBN 92,93% (Rp 613.953.506.880), dengan serapan Anggaran Dekonsentrasi terserap 95,86% (Rp 84.496.445.620) **dan Anggaran** Tugas Pembantuan terserap 92,48% (Rp 529.457.061.260).

c.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Pada tahun 2018 Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah ditargetkan pendapatan sebesar Rp. 40.034.090.000, dan terealisasi sebesar Rp. 12.334.988.597 (30,81 %).

Tabel 10. Perkembangan target dan realisasi pendapatan Th 2017-2018

Uraian	Th 2017	Th 2018	+/-	%
Target	13.075.000.000	40.034.090.000	26.959.090.000	67,34

Realisasi	11.584.521.421	12.334.988.597	750.467.176	6,08
% Capaian	88,60	30,81	2,78	9,03

C. Analisis efisiensi sumberdaya

Sumberdaya yang mendukung pencapaian sasaran kinerja yang ditetapkan meliputi kondisi iklim, sumberdaya lahan, sumberdaya manusia, dan sarana prasarana.

1. Kondisi iklim yang mendukung budidaya pertanian dan perkebunan

Produk pertanian dan perkebunan merupakan produk yang sangat bergantung pada kondisi iklim. Faktor iklim berpengaruh pada pola tatanan agroekosistem. Kondisi seperti ini bisa diprediksi dan telah dipersiapkan, namun tidak dapat dipastikan keakuratannya.

Pada Th 2018 musim kemarau relatif panjang sehingga mengganggu sistem produksi pertanian dan perkebunan terutama tanaman palawija dan sayuran semusim yang dibudidayakan di musim kemarau. Pada musim hujan juga mengakibatkan tanaman terlanda banjir.

2. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian

Rata – rata alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian berdasarkan data BPN menunjukkan angka yang cukup besar. Alih fungsi lahan di Jawa Tengah Tahun 2008-2013 rata-rata 376,33 ha/th. Penyempitan lahan pertanian ini menjadi salah satu kendala yang harus dihadapi untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura. Upaya yang dilakukan adalah sosialisasi dan demonstrasi pemupukan organik dan pemulihan kesehatan tanah dengan Agenia Hayati, laboratorium petani dan rumah pintar petani.

3. Sumber daya manusia

SDM yang bergerak di sektor pertanian dan perkebunan memiliki tingkat pendidikan yang cukup rendah. Petani Jawa Tengah bukan petani komoditas dan mengusahakan berbagai komoditas

mengikuti petani panutan (*early adopter*) yang sukses. Namun kesadaran petani dalam pengaturan pola tanam rendah. Petugas pendamping (penyuluh) belum memenuhi ideal untuk melayani 8.577 desa di Jawa Tengah.

Selain itu ketersediaan tenaga kerja di sektor ini juga berkurang. Alih profesi Rumah Tangga Petani (RTP) ke sektor diluar pertanian cukup tinggi Th 2003 RTP 5.770.801 sensus pertanian Th 2013 4.290.619 RTP, turun 25,65 % (BPS Th 2015).

Upaya yang perlu dan terus diupayakan meliputi modernisasi pertanian (bantuan alat dan mesin), optimalisasi kelompok P₄S (Pusat Pelatihan Pertanian dan Pemberdayaan Petani Swadaya), dan memilih komoditas dengan orientasi kualitas dan pasar untuk meningkatkan nilai jual.

4. Sarana Prasarana

Jumlah sarana dan prasarana pertanian di Jawa Tengah belum memadai. Jaringan irigasi dan pengairan masih banyak kerusakan. Selain itu sarana pendukung pertanian juga kurang, seperti alat, mesin pra dan pasca panen. Melalui Program Upsus Pajale, Upsus babe, perbaikan jaringan irigasi dan fasilitasi bantuan alat-alat dan mesin pertanian telah terlaksana dengan baik.

D. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran

Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah sebagai SKPD teknis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pertanian dan perkebunan, mempunyai fungsi: perumusan kebijakan teknis bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura; pembinaan dan fasilitasi bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan lingkup provinsi dan kabupaten/kota; pelaksanaan tugas di bidang sarana prasarana pertanian, budidaya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dan usaha pertanian; pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pertanian tanaman

pangan, hortikultura dan perkebunan; pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas pokok dan fungsinya. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan sumber daya manusia, sumber dana dan pengelolaan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Berbagai program dan kegiatan yang teralokasi melalui pendanaan APBD dan APBN terukur melalui indikator kinerja utama. Keberhasilan tersebut terwujud dalam peningkatan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang berkelanjutan. Perwujudan ini terdukung oleh berbagai upaya seperti efisiensi tenaga kerja manusia, peningkatan indeks penanaman, peningkatan produktivitas, pengamanan produksi dari gangguan OPT, perbaikan penanganan panen dan pasca panen, dan peningkatan nilai jual melalui orientasi kualitas dan pasar.

E. Perbaikan ke depan

Dalam rangka pencapaian misi RPJMD “Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, yang bertujuan mewujudkan desa mandiri/berdikari melalui kedaulatan pangan dan energi; dan misi meningkatkan penanganan infrastruktur pertanian, maka Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah perlu melakukan serangkaian tindakan perbaikan pada kegiatan-kegiatan yang akan datang.

Terkait dengan sumberdaya, maka Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah perlu melaksanakan strategi dalam antisipasi, menghadapi dan menyelesaikannya, dengan memetakan resiko seperti pada tabel 25. Sedangkan dalam hal alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah menyusun Perda RT / RW dan Perda Lahan pertanian berkelanjutan. Namun dibutuhkan penegakan hukum yang tegas agar permasalahan alih fungsi lahan dapat dihentikan.

Tabel 11. Profil resiko strategi perbaikan ke depan

No	Nama Kegiatan	Resiko	Rencana Tindak Pengendalian
1	Pengembangan padi gogo, percontohan denfarm padi hibrida, pengembangan jagung hibrida, percontohan budidaya gandum, percontohan budidaya sorgum, pengembangan kedelai,	Produksi Tanaman Pangan tidak tercapai (Ton) Th 2018: Padi : 10.351.428 Jagung : 3.053.181 Kedelai : 154.795 Kacang tanah : 143.657 Kacang hijau : 99.061 Ubi kayu : 3.397.000 Ubi jalar: 173.221	a. Penerapan Intensifikasi Pertanian: Sapta Usaha Pertanian; Rantai distribusi pupuk bersubsidi; Kesadaran petani menjaga ekosistem pertanian; kualitas SDM dan ketersediaan tenaga kerja semakin menurun; Diseminasi dan penyerapan teknologi pertanian
2	Pengembangan Kawasan Buah, Kawasan sayuran dan tanaman obat, pengembangan Kawasan tanaman hias, Pemasyarakatan Produk Hortikultura Jawa Tengah	Produksi Tanaman hortikultura tidak tercapai (Ton) Th 2018 Bawang merah: 432.338 Cabe: 127.462 Kentang: 291.725 Durian: 80.916 Mangga: 439.532 Salak: 466.033	b. Pengendalian Terpadu, Katam Terpadu, Antisipasi dan mitigasi perubahan iklim
3	Kegiatan Pengembangan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan	Produksi Tanaman perkebunan tidak tercapai (Ton) Th 2018 Tebu: 4.460.000 Kopi: 18.273 Kelapa: 191.840 Kakao: 1.890 Karet: 4.010 Cengkeh: 7.066 Teh: 6.350	c. Meningkatkan ketersediaan dan mutu benih tanaman pangan dan hortikultura melalui sertifikasi dan pengawasan mutu peredaran benih di masyarakat
4	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian	Jaringan irigasi, lahan, pupuk bersubsidi, dan pupuk organik tidak terkelola dengan baik di tingkat petani	d. Memperbaiki jaringan irigasi, memantapkan peran masyarakat dalam memelihara lahan dan sarana irigasi, e. Melaksanakan kegiatan tepat waktu, teknis, dan sesuai rencana tanam di tingkat penerima manfaat kegiatan
5	Peningkatan Alsintan dan	Sistem produksi TPH bun	a. Pengembangan UPJA

No	Nama Kegiatan	Resiko	Rencana Tindak Pengendalian
	UPJA TPH Kegiatan Pemberdayaan bengkel dalam pengembangan alat mesin perkebunan	terhambat karena kekurangan peralatan dan tenaga kerja, baik alat pra panen maupun pasca panen, berdampak pada produksi TPH bun tidak tercapai	dan Brigade Tanam/panen b. Pengembangan Usaha Penggilingan Padi c. Fasilitasi alat pra dan pasca panen di Kelompok tani
6	Kegiatan Pengembangan Usaha Pertanian, Panen, Pasca Panen, Pemasaran dan Peningkatan SDM Kelembagaan	Terjadi kehilangan hasil panen padi yang tinggi, peningkatan jumlah kelompok tani organik rendah, akses pasar modern dan ekspor terhambat	a. Penggunaan alat dan cara panen padi yang tepat b. Fasilitasi sertifikasi mutu organik kelompok Tani Organik TPH bun c. Promosi produk ke pasar modern dan ekspor untuk produk unggulan TPH bun

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan skala pengukuran pada Indikator Kinerja Utama (IKU) sasaran strategis, nilai kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan secara umum sangat baik dalam "Memantapkan Produksi Komoditas Tanaman Pangan, hortikultura dan perkebunan Utama sebagai Wujud Kontribusi Kedaulatan Pangan di Jawa Tengah." Artinya Distanbun telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

- a. Dinas Pertanian dan Perkebunan menggunakan dana APBD kurang dari dana yang dianggarkan (92,26%, Rp291.832.993.536). Terdapat kegiatan yang tidak terlaksana 100% yaitu pengadaan alat untuk kegiatan intensifikasi kedelai karena kelompok tersebut telah mendapatkan bantuan pada tahun 2017, pengadaan mesin pompa air tidak terlaksana 1 kelompok pada kegiatan pengelolaan lahan kering dan sarana pengairan untuk pengembangan komoditas pangan karena kelompok tersebut telah mendapatkan bantuan pada tahun 2017, kegiatan peningkatan produksi hortikultura harga bibit pisang di penangkar bibit lebih tinggi dari pada pagu harga bibit di DPA tahun 2018, pengadaan bibit jeruk calon kelompok petani penerima belum memiliki SKT, pengadaan bibit cengkeh, cultivator, pengolahan hasil buah carica calon kelompok tani penerima belum memiliki SKT, Pupuk NPK, ZA dan organik untuk lahan komoditas tebu seluas 5 ha calon lahan pertanaman tebu telah beralih komoditas pertanamannya. Penyerapan dana APBN Rp 466.399.630.479(88,05%) dengan perincian serapan Dekonsentrasi Rp 84.496.445.620 (95,86%) dan Tugas Pembantuan Rp 529.457.061.260 (92,48%).
- b. Pendapatan tidak mencapai target yakni dari Rp. 40.034.090.000, dan terealisasi sebesar Rp. 12.334.988.597 (30,81%).

B. Saran

Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, senantiasa mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah

Guna mewujudkan visi tersebut maka Dinas Pertanian dan Perkebunan sebaiknya perlu melakukan perbaikan dalam hal:

1. Sistem peningkatan produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan berkelanjutan, peningkatan efisiensi dalam usaha pertanian, dan sistem peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
2. Sistem pengendalian internal dengan pemetaan resiko masing-masing kegiatan di semua bidang lingkup Dinas, sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan tepat sasaran dan berdampak pada pencapaian *out come* kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan dengan baik.